p-ISSN: 2963-7856| e-ISSN: 2961-9890
Available online at jerkin.org/index.php/jerkin
**Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan**
**Volume 3 No. 4, April-June 2026, pp 793-806**

# Strategi Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

**Fajar Budiman**
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru, Indonesia
E-mail: azzamazzahra@gmail.com
* Corresponding Author

https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5679

**ARTICLE INFO**

**Article history**
*Received: 15 Februari 2026*
*Revised: 19 Februari 2026*
*Accepted: 28 Februari 2026*

**Kata Kunci**
Pengentasan Kemiskinan; Konektivitas Regional; SIKIM, Metode Bardach; Kepulauan Meranti

**Keywords**
Poverty Eradication; Regional Connectivit; SIKIM, Bardach Method; Meranti Islands

**ABSTRACT**

Makalah kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis masalah kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan merumuskan alternatif kebijakan yang rasional serta opsi-opsi untuk mendukung pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan. Studi ini berfokus pada hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor produktif berdasarkan potensi lokal, dan peran konektivitas regional dalam memperkuat aktivitas ekonomi komunitas pulau. Metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah kebijakan ini menerapkan analisis kebijakan komparatif melalui penilaian alternatif kebijakan berdasarkan metode (Bardach, 2012), dengan kriteria kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan pembiayaan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji keselarasan arah kebijakan dan program prioritas untuk pengentasan kemiskinan dalam dokumen perencanaan jangka menengah Pemerintah Pusat (RPJMN 2025-2029), Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Analisis menunjukkan bahwa penguatan konektivitas regional merupakan kebijakan yang paling rasional dan strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Peningkatan konektivitas dianggap sebagai alat utama dalam mendukung pengembangan Pusat Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) berdasarkan komoditas unggulan regional, melalui peningkatan akses logistik, distribusi, dan pemasaran. Kebijakan ini dianggap memiliki kelayakan teknis dan administratif yang tinggi, dukungan politik yang kuat, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional. Oleh karena itu, peningkatan konektivitas regional direkomendasikan sebagai kebijakan prioritas untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Kepulauan Meranti.

*This policy paper aims to analyze poverty issues in Meranti Islands Regency and formulate rational policy alternatives and options to support sustainable poverty eradication. The study focuses on the relationship between human resource quality, the development of productive sectors based on local potential, and the role of regional connectivity in strengthening the economic activities of island communities. The methodology used in writing this policy paper employs comparative policy analysis through the assessment of policy alternatives based on Bardach's (2012) method, with criteria of technical feasibility, economic and financing feasibility, political feasibility, and administrative operability. This analysis was conducted by examining the alignment of policy directions and priority programs for poverty alleviation in the medium-term planning documents of the Central Government (RPJMN 2025-2029), the Riau Provincial Government, and the Meranti Islands Regency Government. The analysis shows that strengthening regional connectivity is the most rational and strategic policy to support poverty eradication in Meranti Islands Regency. Strengthening connectivity is seen as the main instrument in supporting the development of Small and Medium Industry Centers (SIKIM) based on leading regional commodities, through improved logistics,*

*distribution, and marketing access. This policy is considered to have high technical and administrative feasibility, strong political support, and alignment with national and regional development priorities. Therefore, strengthening regional connectivity is recommended as a priority policy to accelerate poverty reduction and promote inclusive economic growth in Meranti Islands Regency*

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Fajar Budiman et al. (2026) Strategi Penghapusan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti .3(4) 793-798. doi: https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5679

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan nasional, khususnya pada wilayah kepulauan dan daerah tertinggal yang menghadapi keterbatasan akses, konektivitas, serta kapasitas ekonomi lokal. Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan disparitas pembangunan antardaerah yang masih cukup tinggi, terutama pada wilayah yang memiliki ketergantungan besar terhadap transportasi laut dan infrastruktur logistik. Keterbatasan konektivitas wilayah dapat berdampak langsung pada tingginya biaya distribusi, rendahnya akses pasar, serta terbatasnya integrasi kegiatan ekonomi lokal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, penghapusan kemiskinan tidak lagi hanya dipahami semata sebagai persoalan bantuan sosial saja, melainkan sebagai upaya terintegrasi yang menghubungkan peningkatan akses layanan dasar, penguatan sektor produktif, serta konektivitas wilayah. Pendekatan ini tercermin dalam arah RPJMN 2025-2029 yang menekankan penguatan ekonomi wilayah berbasis potensi lokal serta peningkatan keterpaduan antar tingkat pemerintah. Namun, dalam praktiknya, keterpaduan antara kebijakan, program, dan pendanaan lintas sektor dan lintas level pemerintahan masih menjadi tantangan, khususnya pada wilayah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan tersebut.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki 4 pulau utama dan 8 pulau kecil serta 18 sungai. total luas wilayah kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar 3.623,95 km, dengan luas pulau-pulau utamanya seperti pulau Tebing Tinggi (1.379,31 km²), pulau Rangsang (918,46 km²), dan pulau Padang dan Merbau (1.326,18 km²).

Posisi astronomis Kabupaten Kepulauan Meranti terletak pada posisi antara 00 42’ 30” - 01028’ 0” lintang utara (lu) dan 1020 12’ 0” – 1030 10’ 0” bujur timur (bt) dengan posisi terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi (growth triagle) Indonesia, Malaysia, Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah hinterland kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tanjung Balai Karimun.

Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut tidak berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Diketahui bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten ini juga tergolong tinggi. menurut data BPS Provinsi Riau tahun 2025, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dari seluruh kabupaten/kota se provinsi Riau yatu sebesar 20,51% pada tahun 2025. Perkembangan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

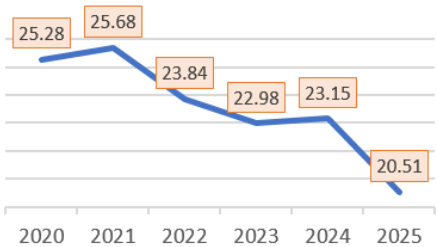


Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti
Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025a)

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan sebesar 25,28% dan turun menjadi 20,51% pada tahun 2025. Namun demikian tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau yang hanya sebesar 6,16%. Tingginya tingkat kemiskinan ini dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Masalah 1 : Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Masalah 2 : Kurang baiknya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Masalah 3 : Keterbatasan lapangan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Terhadap beberapa permasalahan yang menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, telah dilakukan metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) untuk mengetahui masalah utama dengan melibatkan stakeholder terkait pada tim penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau. Hasil scoring dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Skoring Penyebab Permasalahan Kabupaten Kepulauan Meranti

| Masalah | Urgency | Seriousness | Growth | Skor |
|---|---|---|---|---|
| Masalah 1 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| Masalah 2 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Masalah 3 | 4 | 5 | 3 | 12 |

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil skoring di atas, diketahui bahwa penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi fokus pembahasan artikel ini adalah masih rendahnya kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari seberapa besar capaian indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025b), Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat nilai IPM terendah di Provinsi Riau, yaitu sebesar 67,92. angka ini masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 74,79, dan juga di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,20. rendahnya IPM ini mencerminkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi tantangan yang cukup besar.

Dilihat dari unsur pembentuknya, dapat diketahui bahwa penyebab rendahnya kualitas pembangunan manusia adalah :

1. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat (BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2020)
2. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat (BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2020)
3. Rendahnya standar hidup layak (BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2020)

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Banyaknya sekolah negeri di daerah pedesaan yang masih kekurangan tenaga pendidi
2. Akses pendidikan yang masih terbatas
3. Pada tahun 2024, terdapat guru SD/MI yang belum berkualifikasi S.1/D.IV yaitu sebesar 17,05 persen dan guru SMP/MTs yaitu sebesar 9,54 persen.
4. Terdapat 67,78 persen guru SD/MI yang belum tersertifikasi dan 63,94 persen guru SMP/MTs yang belum tersertifikasi
5. Kurang memadainya infrastruktur pendidikan. Pada tahun 2024, bangunan SD/MI yang mengalami kerusakan sebesar 13,16 persen, dan bangunan gedung SMP/MTs 3,29 persen. (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti (2025).

Rendahnya kualitas pendidikan ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

1. Capaian angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Kepulauan Meranti paling rendah di Provinsi Riau pada tahun 2024 sebesar 12,87 tahun
2. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Kepulauan Meranti paling rendah di Provinsi Riau pada tahun 2024 sebesar 8,12 tahun
3. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2024 sebesar 85,00 turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 99,00,
4. Rendahnya APM SMP/MTs tahun 2024 sebesar 75,00 turun dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 87,87
5. Rendahnya indeks numerasi untuk SD/MI baru mencapai 81,29

6. Rendahnya indeks numerasi untuk SMP/MTS baru mencapai 82,44 (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029)

Rendahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengindikasikan rendahnya aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, baik itu karena kurangnya sarana pendidikan, jarak ke sekolah yang jauh, maupun terkait tidak mampunya membayar biaya pendidikan.

Rendahnya pertumbuhan APK dan APM mengindikasikan melemahnya kinerja pengelolaan pendidikan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh sosialisasi terkait usia sekolah yang belum maksimal dan manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara optimal yang disebabkan : (1) belum sempurnanya sistem dan prosedur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti; (2) masih kurangnya partisipasi komite sekolah dalam proses pengembangan sekolah, banyaknya sekolah negeri di daerah perdesaan yang masih kekurangan tenaga pendidik, untuk mengantisipasi hal ini banyak kepala sekolah membayar gaji dengan honor komite; (3) pemahaman dan kesadaran orang tua yang masih rendah atau disebabkan oleh jangkauan atau akses pendidikan yang masih terbatas

Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan oleh berbagai faktor hal antara lain : 1) Kurang memadainya infrastruktur kesehatan maupun infrastruktur dasar, 2) Belum memadainya tenaga medis, 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti (2025)

Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain : 1) Capaian angka harapan hidup pada tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti paling rendah di Provinsi Riau yaitu sebesar 68,48 tahun, 2) Terjadinya peningkatan angka kematian bayi sebanyak 35 bayi per 1.000 kelahiran, 3) Jumlah balita gizi buruk sebanyak 15 orang pada tahun 2024, 4) Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup masih ditemukan sebanyak 11 orang (Ranwal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti (2025)

Permasalahan di atas disebabkan belum optimalnya cakupan pelayan kesehatan yang lebih disebabkan oleh kurangnya infrastruktur kesehatan, jumlah tenaga medis dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan serta pola hidup bersih untuk menurunkan angka penyakit menular dan potensi bayi kerdil (stunting) serta tingkat kesulitan geografis yang tinggi. Misalnya, rasio dokter per satuan penduduk tahun 2024 masih cukup tinggi, dimana seorang dokter harus melayani 4.240 penduduk sedangkan menurut WHO maksimal hanya 2.500 penduduk per dokter

Selain permasalahan pendidikan dan kesehatan, permasalahan lainnya yang menentukan tingkat pembangunan manusia adalah rendahnya standar hidup layak. Rendahnya standar hidup layak di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan oleh rendahnya tingkat pengeluaran per kapita, sehingga menjadi faktor penghambat dalam memperoleh komponen standar hidup layak seperti makanan bergizi, memperoleh pendidikan yang berkualitas dan mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

Rendahnya standar hidup layak di Kabupaten Kepulauan meranti dapat dilihat dari rendahnya pengeluaran per kapita yaitu hanya sebesar 8.988 ribu Rupiah pada tahun 2024, lebih rendah dari pengeluaran per kapita Provinsi yaitu sebesar 11.857 ribu Rupiah pada tahun yang sama.

Rendahnya pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas perdagangan yang disebabkan turunnya harga komoditas di pasar global sehingga memicu penurunan jumlah ekspor ke negara-negara tetangga. Selain itu, belum berkembangnya industri pengolahan lokal yang disebabkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

Mencermati pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa akar masalah penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :

1. Rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Rendahnya kualitas kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Rendahnya standar hidup layak di Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan akar masalah di atas, maka pernyataan masalah dalam makalah kebijakan ini adalah rendahnya kualitas pembangunan manusia yang disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak sehingga menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan deskriptif-komparatif. Analisis kebijakan deskriptif-komparatif merupakan salah satu metode evaluasi yang menggambarkan secara detail mengenai fakta-fakta satu atau lebih kebijakan, lalu kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya dalam berbagai konteks (lokasi, waktu, maupun objek). Analisis kebijakan deskriptif-komparatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG)
   a. Digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor utama penyebab kemiskinan berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan dampaknya. Skor diperoleh melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion) bersama stakeholder Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau.
2. Analisis Perbandingan Kebijakan (Comparative Policy Analysis)
3. Pendekatan Dokumen/Data Sekunder

Data yang digunakan dalam makalah kebijakan ini bersumber dari dokumen resmi pemerintah, seperti publikasi BPS, laporan pembangunan daerah, serta peraturan perundangan yang relevan, yaitu : a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, dan dokumen kebijakan lainnya.
Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan kebijakan guna mengidentifikasi peluang, kesenjangan, dan strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Dukungan Konseptual dan Kebijakan Nasional

Upaya penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan kebijakan nasional yang menjadi landasan pelaksanaan pembangunan. Sejumlah regulasi dan kebijakan strategis memberikan dukungan normatif, konseptual, maupun operasional terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah. Berikut adalah regulasi yang menjadi landasan dalam penghapusan kemiskinan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang ini menjadi dasar bagi sinkronisasi arah kebijakan penghapusan kemiskinan antara RPJMN, RPJMD Provinsi Riau, dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga setiap program pembangunan memiliki kesinambungan dan konsistensi sasaran.
2. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tanggung jawab langsung dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penghapusan kemiskinan melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memperkuat peran desentralisasi fiskal dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan serta mengarahkan belanja daerah secara efektif dalam mendukung prioritas nasional, termasuk penanggulangan kemiskinan. Melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) tematik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berbasis kinerja, pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
4. (*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*, 2024) menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional. Regulasi ini mendukung penguatan perencanaan dan penganggaran terpadu (integrated planning and budgeting system) yang diperlukan untuk

mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah tertinggal.

5. (*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*, n.d.) menjadi rujukan utama dalam penentuan arah kebijakan dan strategi nasional. RPJMN menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029 melalui pendekatan multidimensi yang mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, dan pemutusan rantai kemiskinan antar-generasi. Arah kebijakan ini sejalan dengan prioritas RPJMD Provinsi Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi penyelarasan dan kolaborasi sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat mengakses dukungan pendanaan sinergis, baik dari APBN, APBD, maupun sumber pembiayaan lain, untuk memperkuat intervensi program penghapusan kemiskinan secara lintas sektor.
7. (*Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 2023) yang berfokus pada kualitas perencanaan melalui sinergi, integrasi, dan sinkrinisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan menjadi panduan teknis yang komprehensif dalam pelaksanaan strategi nasional penghapusan kemiskinan ekstrem. Dokumen ini mengatur mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga, pelibatan pemerintah daerah, serta tata kelola pendanaan dan pemantauan program secara terintegrasi.

Berdasarkan berbagai teori kemiskinan, dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang bersifat kompleks, multidimensi, dan memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi. Beberapa teori kemiskinan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Teori Lingkaran Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty)
   Teori Lingkaran Kemiskinan yang dikemukakan oleh (Nurkse, 1953) menjelaskan bahwa kemiskinan bukanlah kondisi yang berdiri sendiri, melainkan sebuah siklus yang saling memperkuat dan sulit diputus. Kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan tabungan. Keterbatasan tersebut kemudian berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta produktivitas tenaga kerja. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan tetap rendah, sehingga kemiskinan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut teori ini, kemiskinan tidak akan dapat diatasi hanya melalui upaya individu, melainkan memerlukan intervensi struktural, terutama dari pemerintah, untuk meningkatkan akses terhadap modal, pendidikan, dan kesehatan sebagai langkah awal untuk memutus siklus kemiskinan yang bersifat turun-temurun (Nurkse, 1953).
2. Teori Keynesian
   Teori Keynesian, yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money (Keynes, 1936), memandang kemiskinan sebagai salah satu konsekuensi dari kegagalan mekanisme pasar dalam menyeimbangkan kegiatan produksi dan konsumsi secara otomatis. Dalam kondisi tertentu, perekonomian dapat mengalami kekurangan permintaan agregat yang menyebabkan rendahnya tingkat produksi dan tingginya pengangguran. Situasi ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan masyarakat, yang kemudian memperbesar tingkat kemiskinan. Menurut perspektif Keynesian, pasar tidak selalu mampu menciptakan kesejahteraan secara merata, sehingga peran aktif pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah dipandang memiliki tanggung jawab untuk melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan program sosial guna meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Bentuk intervensi tersebut dapat berupa belanja publik, subsidi, program kesejahteraan sosial, serta kebijakan redistribusi pendapatan yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan meningkatkan peran negara dalam menyediakan lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik, pemerintah dapat membantu masyarakat miskin keluar dari kondisi pendapatan rendah dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

3. Pendekatan Multidimensional terhadap Kemiskinan
   Pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan berkembang sebagai kritik terhadap pandangan konvensional yang memandang kemiskinan semata-mata sebagai masalah rendahnya pendapatan. Perspektif ini, yang dikembangkan oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) bersama United Nations Development Programme (UNDP) (2010), menekankan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai kekurangan akses terhadap berbagai layanan dan kesempatan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perumahan yang layak, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

**Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu pilar utama pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti. Strategi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui penguatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang tersebar menghadapi tantangan serius dalam pemerataan layanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan, menurunkan angka putus sekolah, serta memperluas cakupan layanan PAUD dan Pendidikan menengah. Selain itu, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan juga menjadi prioritas guna mendorong peningkatan mutu pembelajaran.

Pada bidang kesehatan, strategi difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan dasar yang terjangkau dan merata, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, dan lansia. Upaya ini diwujudkan melalui revitalisasi Puskesmas, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penyediaan gizi seimbang melalui program intervensi gizi di sekolah dan Posyandu.

Selain Pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas SDM juga diarahkan pada pembangunan generasi muda yang produktif dan kompeten. Pelatihan keterampilan kerja berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil sagu, kelapa, kopi, dan hasil perikanan menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mengurangi pengangguran. Dengan strategi ini, diharapkan terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta terbangunnya masyarakat Meranti yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar dan menengah

Suryadi & Tilaar (1993) dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menekankan pendekatan analisis kebijakan yang sistematis untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pendidikan. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam optimalisasi pemberdayaan sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan) serta sumber daya material (sarana prasarana) dalam kebijakan desentralisasi untuk mencapai mutu pendidikan yang tinggi, marketable dan berkelanjutan.

Masih menurut (Suryadi & Tilaar, 1993) dalam bukunya : Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: isu, teori, dan aplikasi (2002), ditekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar konsumsi atau pengeluaran biasa, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Poin-poin pentingnya adalah : 1) Pendidikan sebagai investasi langsung yang berarti pendidikan dianggap sebagai investasi langsung pada manusia untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan (skill), dan produktivitas tenaga kerja. 2) Pendidikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. SDM yang berkualitas tinggi hasil dari pendidikan yang baik akan mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan daya saing ekonomi, yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3) Pendidikan sebagai Pengurangan kemiskinan. Dengan meningkatkan keterampilan, pendidikan memungkinkan individu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan dan berperan langsung dalam mengurangi angka kemiskinan. 4) Pendidikan sebagai pengembangan nilai produktif. Pembangunan pendidikan harus difokuskan pada pengembangan nilai-nilai dan sikap produktif untuk memobilisasi pembangunan nasional.

Merujuk dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029, telah ditetapkan arah kebijakan peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang strategis.

Sebagai wilayah kepulauan dengan hambatan geografis, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi layanan pendidikan, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur sekolah, jumlah dan kualitas tenaga pendidik, maupun sarana pendukung pembelajaran yang layak. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin setiap anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah tanpa hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), Literasi dan Numerasi serta menjamin mutu pendidikan yang merata antar wilayah.

Upaya yang dilakukan mencakup: 1) Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar; 2) Penyediaan dan distribusi tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, termasuk pemberian insentif bagi guru di daerah sulit; Penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu, termasuk pakaian seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah; 3) Peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan; 4) Pemanfaatan teknologi informasi dan pembelajaran digital untuk menjangkau siswa di wilayah yang sulit diakses secara fisik; 5) Penguatan manajemen sekolah dan pelibatan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

Mencermati dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029, untuk mendukung peningkatan pendidikan berkualitas yang merata di Kabupaten kepulauan Meranti, terdapat 6 (enam) program prioritas sebagai berikut : 1) Program Pengelolaan Pendidikan, 2) Program Pengembangan Kurikulum, 3) Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan, 4) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra, 5) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan 6) Program Pembinaan Perpustakaan.

Alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai keenam program prioritas diatas terbilang besar, dengan rentang 95 milyar hingga 100 milyar setiap tahunnya, sehingga kebutuhan dalam periodisasi RPJMD 2025-2029 adalah sebesar 496,5 milyar Rupiah.

2. Meningkatkan Layanan Kesehatan Masyarakat

Menurut (Schultz, 1961) kesehatan merupakan investasi modal manusia (human capital) yang krusial untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan fisik, dan mental tenaga kerja. Investasi kesehatan, bersama dengan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas manusia, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Menurut (Blum, 1981) dalam bukunya Planning for Health peningkatan layanan kesehatan masyarakat akan sangat bergantung pada : 1) lingkungan (environtment) mencakup sanitasi, air bersih, dan kualitas lingkungan; 2) Perilaku (life style/behaviour) melalui promosi gaya hidup sehat; 3) Pelayanan kesehatan (health care), layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan mudah diakses; dan 4) Genetik/keturunan (Heredity)

Merujuk dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti (2025), telah ditetapkan arah kebijakan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat sebagai salah satu arah kebijakan strategis dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan kondisi geografis sebagai daerah kepulauan, tantangan utama dalam sektor kesehatan adalah keterbatasan akses, distribusi tenaga medis yang belum merata, serta sarana dan prasarana layanan kesehatan yang belum sepenuhnya memadai.

Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan mutu pelayanan kesehatan, baik melalui fasilitas layanan tingkat dasar (Puskesmas dan Posyandu) maupun rujukan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan dasar; menurunkan angka kematian ibu dan bayi; meningkatkan gizi balita; serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyakit menular dan tidak menular; Peningkatan kualitas dan cakupan layanan Puskesmas, termasuk pembangunan Puskesmas rawat inap dan Puskesmas pembantu di wilayah terpencil; Penguatan layanan Posyandu dan kesehatan ibu–anak, terutama di desa-desa dan wilayah 3T; Pemerataan tenaga medis dan paramedis; serta penyediaan insentif bagi dokter dan bidan yang bertugas di wilayah sulit; Program imunisasi; pencegahan stunting, dan intervensi gizi spesifik pada ibu hamil, bayi, dan balita; Pemanfaatan sistem informasi kesehatan digital (e-kesehatan) untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pencatatan data kesehatan; Peningkatan edukasi dan promotif Kesehatan masyarakat berbasis komunitas.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, tercapainya target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, serta terbentuknya sistem pelayanan kesehatan yang tanggap, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mencermati dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029, untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten kepulauan Meranti, terdapat 8 (delapan) program prioritas yang memerlukan alokasi pendanaan yang besar.

Untuk membiayai kedelapan program prioritas dimaksud dibutuhkan dana sebesar 140,9 milyar setiap tahunnya dengan akumulasi pada periodisasi RPJMD 2025-2029 sebesar 704 milyar.

3. Meningkatkan standar hidup layak dengan mendorong pengembangan industri lokal dan penguatan UMKM dan ekonomi kreatif

Menurut (Todaro & Smith, 2006), pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi dan output per kapita yang didorong oleh transformasi struktural, terutama perluasan sektor industri dan perdagangan. Pertumbuhan sektor modern ini memungkinkan peningkatan pendapatan per kapita dan standar hidup secara keseluruhan

Menurut (United Nations Development Programme, 1990) standar hidup layak bukan sekadar peningkatan pendapatan, melainkan kemampuan penduduk untuk mengakses sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui pengembangan industri lokal dan penguatan UMKM dan ekonomi kreatif .

Merujuk dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2025-2029, telah ditetapkan arah kebijakan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendorong pengembangan industri lokal dan penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, seperti penguatan komoditas unggulan seperti sagu, kelapa, kopi dan hasil perikanan, yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada penjualan bahan mentah, dengan nilai tambah yang rendah dan keterbatasan akses pasar yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui arah kebijakan ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan sektor hilir dari komoditas unggulan dengan mendorong terbentuknya industri pengolahan yang berbasis kerakyatan; meningkatkan daya saing produk lokal, serta menciptakan lapangan kerja yang luas; Pembangunan sentra industri kecil dan menengah (IKM) untuk olahan sagu, kelapa (minyak, arang, olahan pangan), dan hasil laut (ikan asin, kerupuk, frozen food); Peningkatan akses pelaku usaha terhadap teknologi tepat guna dan peralatan produksi; Pemberdayaan koperasi dan kelompok tani/nelayan dalam manajemen usaha dan pemasaran produk; Pelatihan kewirausahaan dan sertifikasi produk agar mampu menembus pasar lokal, nasional, dan ekspor; Kemitraan dengan BUMD, swasta, dan perguruan tinggi untuk inovasi produk dan penguatan rantai nilai industri; Peningkatan promosi dan branding produk unggulan Meranti, termasuk melalui pameran dan platform digital. Dengan arah kebijakan ini, pengembangan industri sagu, kelapa, kopi, dan hasil perikanan tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mewujudkan ekonomi Meranti yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Di sisi lain, sektor ekonomi kreatif mulai tumbuh dan menunjukkan potensi besar, terutama di kalangan generasi muda dalam bidang kuliner, kerajinan, seni, hingga digital. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Meranti yang menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, minimnya pemanfaatan teknologi, serta kurangnya pelatihan dan pendampingan usaha.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terdapat 6 (enam) program prioritas dengan alokasi dana setiap tahunnya berkisar 1,4 milyar Rupiah.

Program prioritas tersebut terkait dengan perdagangan dan ekspor, antara lain program Pengembangan Ekspor yang menyasar pengembangan ekspor di Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian terdapat Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang menyasar peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Kemudian juga terdapat Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang menyasar peningkatan peningkatan sarana perdagangan.

Kemudian agar harga-harga barang pokok tetap stabil, terdapat program Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menyasar peningkatan stabilisasi harga di

Kabupaten Kepulauan Meranti.

## ALTERNATIF KEBIJAKAN

Setelah melakukan analisis sebagaimana penjelasan diatas, diperoleh alternatif penyelesaian masalah sebagai konsep berikut :

1. Konsep meningkatkan kualitas Pendidikan menurut (Suryadi & Tilaar, 1993)), menekankan optimalisasi pemberdayaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, kurikulum yang marketable.
2. Konsep meningkatkan kualitas layanan Kesehatan menurut (Blum, 1981) lingkungan (environtment) mencakup sanitasi, air bersih, dan kualitas lingkungan; 2) Perilaku (life style/behaviour) melalui promosi gaya hidup sehat; 3) Pelayanan kesehatan (health care), layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan mudah diakses.
3. Konsep meningkatkan standar hidup layak menurut (Todaro & Smith, 2006),
4. ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi terutama perluasan sektor industri dan perdagangan.

Mencermati RPJMN 2025-2029, sasaran dan strategi pembangunan nasional menunjukkan penekanan pada penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Strategi utama penanggulangan kemiskinan pada RPJMN 2025-2029 adalah :

1. Stabilitas ekonomi makro; pertumbuhan ekonomi inklusif dan menjaga inflasi
2. Pengurangan beban pengeluaran; bantuan sosial dan jaminan sosial
3. Peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja
4. Layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah; membangun SDM dan perluasan akses ekonomi

Gambar 2. Prasyarat Penurunan Kemiskinan
Sumber : RPJMN 2025-2029

Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor lintas prioritas nasional. Hal ini membutuhkan prasyarat yaitu pertama, integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Ketiga, optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan akses terhadap pasar serta teknologi. Keempat, komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan.

Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi kunci di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas. Strategi peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui wajib belajar 13 tahun; pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja; perluasan layanan pendidikan anak usia dini; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

tinggi; serta peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul.

Sedangkan di bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan stunting serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular; peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan sumber daya kesehatan.

Strategi pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya.

Dalam konteks Kabupaten Meranti, pilar utama pembangunan sumber daya manusia produktif diarahkan pada intervensi konkret di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan, permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan akses dan sarana prasarana, tetapi juga pada relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja regional. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang strategis yaitu terletak berdekatan dengan kawasan industri Batam dan Dumai merupakan potensi strategis yang perlu dimanfaatkan melalui penyiapan tenaga kerja terampil dan juga siap kerja. Oleh karena itu, intervensi kebijakan pendidikan difokuskan pada peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik berkurikulum vokasi sebagai dasar pengembangan sekolah vokasi, guna menghasilkan lulusan pendidikan menengah yang mampu bersaing di pasar kerja regional.

Pada bidang kesehatan, intervensi kebijakan diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan primer. Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah keterbatasan jangkauan layanan kesehatan dasar di wilayah kepulauan dan desa terpencil, yang berdampak pada masih tingginya risiko stunting, penyakit menular, permasalahan kesehatan jiwa, serta sanitasi lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, strategi kesehatan difokuskan pada perluasan jangkauan dan penguatan fungsi Puskesmas, khususnya dalam penanggulangan stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan, pengendalian penyakit menular, peningkatan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas, serta perbaikan sanitasi sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

Sementara itu, strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diarahkan pada penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki komoditas unggulan seperti sagu, kelapa, kopi, dan hasil perikanan yang berpotensi dikembangkan melalui pendekatan industrialisasi skala kecil dan menengah. Namun demikian, keterbatasan konektivitas wilayah masih menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan nilai tambah, distribusi hasil produksi, serta akses pasar. Oleh karena itu, intervensi kebijakan ekonomi difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penguatan konektivitas dipandang sebagai prasyarat penting agar SIKIM dapat berfungsi secara efektif dalam mengintegrasikan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan daerah.

Pemilihan alternatif kebijakan dilakukan menggunakan metode (Bardach, 2012) dengan empat kriteria penilaian, yaitu:

1. Technical Feasibility, mengukur apakah alternatif yang diajukan yang diajukan secara teknis dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Economic and Financial Possibility, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap alternatif kebijakan dan apakah yang nantinya dihasilkan dapat disebut sebagai kemanfaatan.
3. Political Viability, mengukur apakah setiap kebijakan nantinya akan memberikan dampak kekuatan secara politis bagi kelompok-kelompok tertentu.
4. Administrative Operability, mengukur kemungkinan diterapkannya alternatif kebijakan tersebut dari perspektif administratif ketersediaan.

Tabel 2. Pemilihan Alternatif Kebijakan dengan Metode Bardach (2012)

| Alternatif | 1 | 2 | 3 | 4 | Skor |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternatif 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| Alternatif 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| Alternatif 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |

Catatan: skor diperoleh melalui diskusi dengan Sekretariat TKPK Pronvisi Riau.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Bab II, diperoleh tiga alternatif kebijakan utama yang dinilai paling relevan untuk menjawab permasalahan struktural kemiskinan, yaitu: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi; (2) peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui perluasan jangkauan Puskesmas; dan (3) penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal melalui pembangunan SIKIM yang didukung oleh penguatan konektivitas wilayah. Ketiga alternatif kebijakan ini selanjutnya dievaluasi menggunakan metode (Bardach, 2012) untuk menentukan kebijakan yang paling rasional, realistis, dan layak direkomendasikan.

Metode Bardach digunakan karena mampu menilai kebijakan secara komprehensif dari empat aspek utama, yaitu kelayakan teknis (technical feasibility), kemungkinan ekonomi dan pendanaan (economic and financial possibility), kelayakan politik (political viability), serta kemampuan operasional administratif (administrative operability). Penilaian dilakukan dengan pemberian skor terhadap masing-masing alternatif berdasarkan diskusi dengan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam tabel penilaian alternatif kebijakan.

Alternatif kebijakan pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan vokasi. Alternatif ini didasarkan pada kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang berada pada posisi strategis di sekitar kawasan industri Batam dan Dumai, sehingga secara teoritis memiliki peluang besar untuk menyiapkan tenaga kerja terampil yang dapat terserap ke pasar kerja regional. Dari sisi ekonomi dan sosial, kebijakan ini dinilai mampu memberikan dampak jangka menengah dan panjang terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta daya saing tenaga kerja lokal. Namun demikian, dari sisi kelayakan teknis dan administratif, kebijakan ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Pengembangan pendidikan vokasi membutuhkan kesiapan tenaga pendidik dengan kompetensi khusus, kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, serta investasi sarana dan prasarana yang relatif besar. Selain itu, dampak kebijakan ini terhadap penurunan kemiskinan tidak bersifat langsung dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat dirasakan secara signifikan. Oleh karena itu, meskipun secara strategis penting, alternatif kebijakan ini dinilai kurang optimal untuk dijadikan prioritas utama dalam konteks keterbatasan fiskal dan kebutuhan penanganan kemiskinan yang mendesak.

Alternatif kebijakan kedua adalah peningkatan layanan kesehatan masyarakat melalui perluasan jangkauan dan penguatan fungsi Puskesmas. Alternatif ini berangkat dari permasalahan tingginya angka stunting, keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan, serta masih rendahnya kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Dari sisi kelayakan teknis dan administratif, kebijakan ini relatif mudah diimplementasikan karena telah didukung oleh regulasi, standar pelayanan minimal (SPM), serta struktur kelembagaan yang sudah berjalan. Dari sisi politik, kebijakan kesehatan juga memiliki tingkat penerimaan yang tinggi karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dari perspektif ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, kebijakan ini lebih berperan sebagai kebijakan pendukung (enabler) dibandingkan sebagai penggerak utama peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak kebijakan ini terhadap pengurangan kemiskinan bersifat tidak langsung, melalui peningkatan kualitas hidup dan produktivitas jangka panjang, sehingga dinilai belum cukup kuat untuk menjadi instrumen utama penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Alternatif kebijakan ketiga adalah penguatan sektor produktif berbasis potensi lokal melalui pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang didukung oleh penguatan konektivitas wilayah. Alternatif ini berangkat dari kondisi objektif perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertumpu pada komoditas unggulan seperti sagu, kelapa, dan perikanan, namun masih didominasi oleh aktivitas hulu dengan nilai tambah yang rendah. Pengembangan SIKIM diposisikan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)

pendapatan masyarakat. Dalam evaluasi Bardach, alternatif ini memperoleh skor tertinggi karena dinilai paling seimbang dari keempat aspek penilaian.

Dari sisi kelayakan teknis, kebijakan ini didukung oleh program-program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029, seperti pembangunan Pelabuhan Dorak, pembangunan Jembatan Tebing tinggi–Merbau, serta pengembangan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di sektor perkebunan dan perikanan. Dari sisi ekonomi dan pendanaan, kebijakan ini memungkinkan dilakukannya sinergi pendanaan antara APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, APBD Provinsi Riau, dan APBN, sehingga dapat mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Dari sisi politik, kebijakan ini memiliki tingkat dukungan yang tinggi karena sejalan dengan agenda nasional pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah afirmasi. Sementara itu, dari sisi kemampuan operasional administratif, kebijakan ini dapat diimplementasikan melalui mekanisme perencanaan yang sudah ada, tanpa memerlukan pembentukan kelembagaan baru.

Berdasarkan hasil penilaian menggunakan metode (Bardach, 2012), alternatif kebijakan penguatan konektivitas wilayah dalam mendukung pembangunan SIKIM memperoleh skor total tertinggi dibandingkan dua alternatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan pilihan yang paling rasional, realistis, dan layak untuk direkomendasikan sebagai kebijakan utama dalam upaya penghapusan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebijakan ini tidak hanya menjawab permasalahan ekonomi masyarakat secara langsung melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai program lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan secara lebih efektif.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis yang sudah dikemukakan sebelumnya, strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti diarahkan pada peningkatan kinerja konektivitas sektor produktif berbasis potensi lokal melalui pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM). Namun demikian, pembangunan SIKIM tidak dapat dilepaskan dari permasalahan struktural wilayah kepulauan, yaitu keterbatasan konektivitas antar pulau dan antar wilayah. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dalam makalah kebijakan ini adalah kebijakan substantif pengentasan kemiskinan yang difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan SIKIM di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara prosedural, kebijakan ini merupakan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti berupa dokumen sinergi pendanaan untuk memetakan program pengentasan kemiskinan khususnya peningkatan konektivitas di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan program prioritas Provinsi dan nasional, sekaligus sebagai dasar koordinasi pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Pusat. Penyusunan dokumen sinergi tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau serta kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan ini menyelesaikan pernyataan masalah yang disampaikan pada bab sebelumnya karena dengan peningkatan konektivitas akan menekan biaya logistic sehingga harga barang murah, mendorong pembangunan sentra industri kecil dan menengah, sehingga lapangan pekerjaan terbuka dan meningkatkan pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan perkapita akan meningkatkan standar hidup layak masyarakat dan pada akhirnya dapat mengentasakan kemiskinan.

Cara kebijakan ini menyelesaikan masalah adalah dengan mengintegrasikan kebijakan dan program untuk meningkatkan konektivitas pada tiap tingkatan pemerintahan sehingga diharapkan dapat membuka keterisoliran wilayah, memperlancar arus orang dan barang, biaya logistik semakin murah, terwujudnya sentra industri kecil dan menengah (SIKIM) yang dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga terwujudnya peningkatan pendapatan perkapita.

Dalam implementasinya, penguatan konektivitas wilayah sebagai instrumen pendukung pembangunan SIKIM diarahkan melalui pemanfaatan program-program Prioritas Nasional yang telah tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan relevan dengan karakteristik Kepulauan Meranti. Program-program tersebut antara lain pembangunan Pelabuhan Dorak, pembangunan Jembatan Tebing tinggi–

Merbau, serta pemberdayaan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi pada sektor perkebunan sagu, kelapa, kopi serta hasil perikanan. Program-program ini berada di bawah kewenangan dan pembinaan kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Perhubungan untuk sektor transportasi dan konektivitas, serta kementerian koordinator dan kementerian teknis terkait untuk pengembangan sektor ekonomi produktif.

Secara lebih operasional, penguatan konektivitas wilayah dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pelabuhan, serta penyelenggaraan layanan angkutan penyeberangan roll-on roll-off (roro) secara rutin setiap hari. Penyelenggaraan layanan roro ini berada dalam kerangka kewenangan Kementerian Perhubungan sebagai kementerian/lembaga yang menaungi sektor transportasi laut dan penyeberangan. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah memastikan kesiapan wilayah, dukungan perencanaan, serta pengintegrasian program tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga dapat memperoleh dukungan pendanaan dan fasilitasi dari Pemerintah Pusat.

Melalui penguatan konektivitas wilayah, pembangunan SIKIM di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat berjalan lebih efektif karena terhubung dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas. Konektivitas yang membaik akan menurunkan biaya logistik, meningkatkan mobilitas barang dan tenaga kerja, serta memperkuat keterkaitan antara sektor produksi dan pasar. Dalam jangka menengah, kondisi ini akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

## REFERENSI

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025a). *Riau dalam Angka Tahun 2025*. BPS Riau.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025b). *Riau dalam Angka Tahun 2025*. BPS Riau.

Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (4th ed.). CQ Press.

Blum, H. L. (1981). *Planning for Health: Generics for the Eighties*. Human Science Press.

Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Palgrave Macmillan.

Nurkse, R. (1953). *Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty)*. MacMillan & Co., Ltd.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (2025). *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025-2029*. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

*Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. (2023). Pemerintah Republik Indonesia.

*Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*. (2024). Pemerintah Republik Indonesia.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. (n.d.). Pemerintah Republik Indonesia.

Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, *51*(1), 1–17.

Suryadi, A., & Tilaar, H. A. R. (1993). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. Pearson Education.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report 1990*. UNDP.

Copyright © 2025, Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
ISSN 2963-7856 (print), ISSN 2961-9890 (online)